

NEW SOUTHBOUND POLICY 2.0 TAIWAN TERHADAP PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ANALISIS KONSTRUKTIFISME STUDI KASUS PEKERJA MIGRAN TAIWAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023 - 2025

Jumiat¹, Ali Martin², Sugiarto Pramono³

Universitas Wahid Hasyim, Semarang,

ajisaka.oke39@gmail.com¹, alimartin@unwahas.ac.id², sugiartopramono@unwahas.ac.id³

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2026-07-17

Revised : 2026-07-27

Accepted: 2026-07-31

KEYWORDS

New Southbound Policy 2.0;
Indonesian Migrant Workers;
Migrant Workers in Taiwan.

KATA KUNCI

New Southbound Policy 2.0;
Pekerja Migran Indonesia;
Pekerja Migran Taiwan

ABSTRACT

This Studi is motivated by the implementation of the New Southbound Policy 2.0, which has increased the placement of Indonesian migrant workers in Taiwan, including those from Kendal Regency. However, migrant worker placement remains concentrated in the caregiving and domestic sectors, which are vulnerable to wage-related issues, contract violations, and inadequate legal protection. Studies examining the implementation of this policy at the local level also remain limited. Therefore, this Studi analyzes the implementation of the New Southbound Policy 2.0 in relation to the placement of migrant workers from Kendal Regency in Taiwan during the 2023–2025 period through a constructivist perspective. This research employs a qualitative method with a case Studi approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation and analyzed through data collection, reduction, presentation, and conclusion-drawing stages. The findings indicate that the implementation of the New Southbound Policy 2.0 has increased the placement of migrant workers from Kendal Regency in Taiwan. Nevertheless, their employment remains dominated by the caregiving and domestic sectors, which are vulnerable to problems related to wages, employment contracts, and legal protection. Research on the implementation of this policy at the local level also remains limited. Therefore, this Studi examines the implementation of the New Southbound Policy 2.0 in the placement of migrant workers from Kendal Regency in Taiwan from 2023 to 2025 using a constructivist perspective.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Implementasi New Southbound Policy 2.0 telah meningkatkan penempatan pekerja migran Indonesia ke Taiwan, termasuk dari Kabupaten Kendal. Namun, penempatan masih didominasi sektor caregiver dan domestik yang rentan terhadap persoalan upah, kontrak, dan perlindungan hukum. Kajian pada tingkat daerah juga masih terbatas. Karena itu, penelitian ini menganalisis implementasi NSP 2.0 terhadap penempatan pekerja migran asal Kendal ke Taiwan pada 2023–2025 melalui perspektif konstruktivisme. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Implementasi New Southbound Policy 2.0 telah meningkatkan penempatan pekerja migran asal Kabupaten Kendal ke Taiwan, tetapi masih didominasi sektor caregiver dan domestik yang rentan terhadap persoalan upah, kontrak, serta perlindungan hukum. Kajian mengenai penerapan kebijakan tersebut pada tingkat daerah juga masih terbatas, sehingga penelitian ini menganalisis implementasi NSP 2.0 terhadap penempatan pekerja migran Kendal ke Taiwan periode 2023–2025 melalui perspektif konstruktivisme.

1. Pendahuluan

Perubahan struktur geopolitik kawasan Indo-Pasifik dalam satu dekade terakhir telah mendorong lahirnya strategi kebijakan luar negeri berbasis konektivitas manusia atau *people-to-people connectivity*. Sebagaimana disampaikan oleh Kabinawa (2023) pendekatan ini merupakan instrumen diplomasi alternatif di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, termasuk bagian strategi yang dilakukan oleh Taiwan. Dalam konteks tersebut, Taiwan mengembangkan New Southbound Policy (NSP) sejak 2016 yang kemudian diperluas menjadi NSP 2.0 sebagai strategi diversifikasi hubungan eksternal sekaligus upaya mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok. NSP 2.0 tidak hanya menekankan kerja sama ekonomi, tetapi juga mobilitas manusia, pendidikan, budaya, dan tenaga kerja sebagai fondasi hubungan internasional yang berbasis masyarakat (Effendi, 2023). Kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari diplomasi negara-ke-negara menuju diplomasi masyarakat, di mana aktor non-negara seperti pekerja migran memainkan peran strategis dalam membentuk relasi antarnegara.

Penelitian ini menggunakan perspektif konstruktivisme untuk menjelaskan bagaimana pekerja migran berperan sebagai aktor non-negara dalam hubungan Indonesia–Taiwan.

Effendi (2023) dan Jamil (2024) menjelaskan bahwa hubungan Indonesia–Taiwan merupakan contoh unik hubungan internasional tanpa relasi diplomatik formal, namun memiliki intensitas interaksi ekonomi dan sosial yang sangat tinggi. Indonesia tetap berpegang pada kebijakan One China Policy, sehingga hubungan kedua pihak berlangsung melalui jalur non-resmi yang meliputi perdagangan, pendidikan, dan migrasi tenaga kerja. Dalam kerangka NSP 2.0, pekerja migran Indonesia menjadi pilar utama hubungan bilateral karena keberadaan mereka menopang stabilitas sektor sosial Taiwan yang menghadapi fenomena *aging society* dan kekurangan tenaga kerja domestik (Ramadhan & Amaliyah, 2023). Data BP2MI (2024) menunjukkan bahwa lebih dari 264 ribu pekerja migran Indonesia berada di Taiwan pada tahun 2023, dengan sekitar 70% terkonsentrasi di sektor perawatan lansia dan pekerjaan domestik, yang mengindikasikan adanya ketergantungan struktural Taiwan terhadap tenaga

kerja migran Indonesia sebagai bagian integral dari sistem kesejahteraan sosialnya.

Tren penempatan pekerja migran Indonesia ke Taiwan dalam periode 2023–2025 menunjukkan peningkatan yang konsisten dan signifikan. Berdasarkan data BP2MI, Taiwan secara konsisten menjadi negara tujuan utama dengan kontribusi sekitar 30% dari total penempatan pekerja migran Indonesia secara global. Pada tahun 2025, Taiwan menyerap hampir 90 ribu pekerja migran Indonesia, menegaskan posisinya sebagai pusat gravitasi baru migrasi tenaga kerja Indonesia di Asia Timur. Data tersebut secara empiris memperlihatkan bahwa NSP 2.0 berhasil menciptakan ruang mobilitas tenaga kerja yang semakin besar sekaligus memperkuat hubungan ekonomi-sosial Indonesia–Taiwan (BP2MI, 2024; IOM, 2023). Stabilitas persentase penempatan sebesar 29–30% dari total global mengindikasikan bahwa NSP 2.0 telah menciptakan kerangka kebijakan yang berkelanjutan, meskipun total penempatan global mengalami fluktuasi akibat dinamika pascapandemi.

Tabel 1. Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Taiwan, 2023–2025

Tahun	Total PMI Global	PMI ke Taiwan	Persentase Taiwan
2023	274.965	83.216	30,3%
2024	297.434	86.561	29,1%
2025	296.948	89.960	30,3%

Sumber: BP2MI (2024); Data Ketenagakerjaan Indonesia (2025)

Dalam konteks domestik, Provinsi Jawa Tengah termasuk lima besar daerah penyumbang pekerja migran Indonesia, yang menunjukkan adanya dinamika struktural pada tingkat lokal terkait keterbatasan lapangan kerja dan ketimpangan pembangunan (Caroline et al., 2019). Kabupaten Kendal sebagai bagian dari koridor industri Semarang–Kendal merupakan salah satu kantong utama pengirim pekerja migran, dengan lebih dari 3.700 orang ditempatkan di Taiwan pada tahun 2024,

atau meningkat sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya (BP2MI, 2024). Lonjakan tersebut mengindikasikan adanya rebound migration effect pascapandemi, sekaligus memperlihatkan bahwa migrasi telah berkembang menjadi strategi ekonomi struktural masyarakat Kendal yang tidak semata didorong oleh faktor ekonomi, melainkan juga oleh konstruksi sosial berupa reputasi pekerja Indonesia sebagai tenaga kerja disiplin, adaptif, dan terpercaya.

Pemilihan Kabupaten Kendal sebagai studi kasus dalam penelitian ini didasarkan pada tiga pertimbangan utama. Pertama, Kendal merupakan daerah dengan pertumbuhan penempatan PMI ke Taiwan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana ditunjukkan oleh data Disnaker Kabupaten Kendal (2025). Kedua, ketersediaan data sekunder dari Dinas Tenaga Kerja dan BP2MI Cabang Semarang yang relatif lengkap dan aksesibel memungkinkan analisis kuantitatif yang mendalam. Ketiga, posisi Kendal sebagai koridor industri Semarang–Kendal menciptakan dinamika dualisme ekonomi antara sektor formal dan informal, sehingga mendorong migrasi tenaga kerja sebagai strategi ekonomi alternatif bagi masyarakat lokal. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadikan Kabupaten Kendal sebagai lokasi yang representatif untuk mengkaji bagaimana kebijakan global diterjemahkan ke dalam dinamika lokal.

Tabel 2. Tren Penempatan PMI Kabupaten Kendal ke Taiwan, 2023–2025

Tahun	PMI Kendal ke Taiwan	Pertumbuhan
2023	3.118 orang	–
2024	3.742 orang	+20%
2025	4.100 orang (estimasi)	+9–10%

Sumber: BP2MI (2024); Disnaker Kabupaten Kendal (2025)

Pendekatan konstruktivisme dalam hubungan internasional memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami fenomena migrasi tenaga

kerja ini, karena menekankan peran ide, norma, identitas, dan interaksi sosial dalam membentuk realitas global. Alexander Wendt (1992) menegaskan bahwa hubungan internasional dibentuk melalui interaksi sosial yang menghasilkan identitas dan kepentingan bersama. Dalam konteks NSP 2.0, pekerja migran Indonesia tidak dapat lagi dipahami semata sebagai aktor ekonomi, melainkan sebagai agen sosial yang secara bertahap membentuk identitas Taiwan sebagai mitra strategis Asia Tenggara sekaligus membangun identitas diri mereka sebagai aktor transnasional (Putri Zakiyyah, 2025). Dominasi sektor caregiver yang mencapai 56% penempatan PMI Kendal di Taiwan merupakan cerminan konstruksi identitas kolektif yang terbentuk melalui interaksi berulang antara kebijakan tenaga kerja Taiwan, pengalaman pengguna jasa, serta narasi pemerintah Indonesia yang menempatkan pekerja migran sebagai “pahlawan devisa”. Dalam perspektif konstruktivisme, identitas tersebut bukan bersifat alamiah, melainkan terbentuk dan direproduksi melalui proses sosial dalam relasi Indonesia–Taiwan.

Meskipun arus migrasi terus meningkat, implementasi NSP 2.0 masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Sebagian besar pekerja migran Indonesia terkonsentrasi pada sektor berpenghasilan rendah dengan tingkat kerentanan kerja yang tinggi. Laporan IOM (2023) mencatat masih tingginya pengaduan terkait kondisi kerja, pelanggaran kontrak, dan perlindungan hukum. Di sisi lain, transformasi ekonomi Taiwan menuju industri teknologi tinggi membuka peluang bagi pekerja migran berketerampilan lebih tinggi, namun belum diimbangi dengan strategi peningkatan kapasitas yang memadai dari sisi Indonesia. Kondisi ini menuntut transformasi kebijakan penempatan pekerja migran yang tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas dan perlindungan tenaga kerja secara menyeluruh (Ramadhan & Amaliyah, 2023).

Kajian mengenai New Southbound Policy selama ini masih didominasi oleh perspektif ekonomi dan geopolitik pada level nasional, sementara penelitian yang menempatkan pekerja migran sebagai aktor

hubungan internasional dalam perspektif konstruktivisme, khususnya pada level daerah, masih sangat terbatas. Khususnya, belum ada penelitian yang secara spesifik mengaitkan data penempatan PMI tingkat kabupaten dengan dinamika kebijakan NSP 2.0 dalam kerangka waktu 2023–2025. Data BP2MI menunjukkan pertumbuhan signifikan di Kabupaten Kendal (+20% pada tahun 2024), namun belum ada kajian yang menjelaskan mekanisme kebijakan di balik angka tersebut. Padahal kebijakan migrasi pada dasarnya diimplementasikan pada level lokal, karena daerah merupakan sumber utama tenaga kerja migran. Kabupaten Kendal sebagai salah satu kantong utama pekerja migran ke Taiwan menjadi kasus yang relevan untuk mengkaji bagaimana kebijakan global diterjemahkan ke dalam dinamika lokal, serta bagaimana pekerja migran berperan sebagai penghubung hubungan internasional Indonesia–Taiwan.

Berdasarkan uraian di atas, muncul pertanyaan fundamental mengenai bagaimana implementasi kebijakan NSP 2.0 di tingkat global diterjemahkan menjadi dinamika penempatan pekerja migran di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Kendal. Pertanyaan ini menjadi fondasi analisis penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian hubungan internasional yang menempatkan migrasi tenaga kerja sebagai praktik sosial pembentuk relasi antarnegara, sekaligus memberikan implikasi praktis bagi penguatan strategi peningkatan kapasitas dan perlindungan pekerja migran Indonesia di era NSP 2.0.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam implementasi New Southbound Policy 2.0 dalam dinamika penempatan pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Kendal ke Taiwan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengkaji fenomena sosial yang kompleks berdasarkan konteks kehidupan nyata, sedangkan studi kasus memungkinkan

penelitian difokuskan pada satu unit analisis tertentu secara mendalam (Assyakurrohim et al., 2022; Septiana et al., 2024). Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kendal pada Januari hingga April 2026 karena wilayah tersebut merupakan salah satu kantong pengirim PMI ke Taiwan, memiliki akses data ketenagakerjaan yang memadai, serta menunjukkan dinamika ekonomi lokal yang relevan dengan migrasi internasional. Data dikumpulkan melalui triangulasi sumber dan metode yang mencakup data sekunder dari BP2MI, Disnaker Kabupaten Kendal, dokumen NSP 2.0, serta literatur akademik, dan data primer melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi partisipatif (Nurfajriani et al., 2024; Zahroh et al., 2025). Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterkaitan dengan fokus penelitian, yaitu petugas Disnaker Kendal, penyalur resmi PMI, dan pekerja migran asal Kendal yang berangkat ke Taiwan pada periode 2023–2025 (Subhaktiyasa, 2024). Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi atau tabel, serta penarikan kesimpulan secara induktif dan berulang dengan menggunakan teori konstruktivisme hubungan internasional sebagai kerangka analisis (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

3. Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Penelitian ini mengidentifikasi dinamika penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Kendal ke Taiwan dalam konteks implementasi *New Southbound Policy 2.0* (NSP 2.0). Data penelitian diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal, KP2MI/BP2MI, serta wawancara semi-terstruktur dengan lima informan yang mewakili unsur pemerintah, perusahaan penempatan pekerja migran, dan PMI purna. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara perubahan kebijakan, peningkatan penempatan PMI, dan terbentuknya relasi sosial transnasional antara masyarakat Indonesia dan Taiwan.

Secara kuantitatif, jumlah PMI asal Kabupaten

Kendal yang ditempatkan di Taiwan menunjukkan tren peningkatan pada periode 2023–2025. Jumlah penempatan meningkat dari 3.118 orang pada 2023 menjadi 3.742 orang pada 2024 atau tumbuh sebesar 20,0%. Pada 2025, jumlah penempatan diproyeksikan mencapai 4.100 orang. Sektor perawatan lansia (*caregiver*) menjadi sektor dominan dengan proporsi yang meningkat dari 54,2% pada 2023 menjadi 58,0% pada 2025. Selain itu, sektor manufaktur juga menunjukkan peningkatan, sedangkan sektor jasa dan rumah tangga mengalami penurunan proporsi. Program ke Taiwan sekarang lebih mudah karena proses administrasi lebih cepat dibanding beberapa tahun sebelumnya." (Informan PMI-3)

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi NSP 2.0 berkaitan dengan perubahan dalam tata kelola penempatan PMI ke Taiwan. Perubahan regulasi dan kerja sama ketenagakerjaan mendorong terbentuknya mekanisme penempatan yang lebih terstruktur, terutama dalam perluasan kesempatan kerja, penguatan prosedur penempatan, dan penyesuaian kompetensi pekerja terhadap kebutuhan tenaga kerja Taiwan. Jumlah penempatan PMI asal Kabupaten Kendal meningkat dari 3.118 orang pada tahun 2023 menjadi 3.742 orang pada tahun 2024.

Pada tingkat lokal, ditemukan adanya konstruksi identitas kolektif terhadap PMI asal Kendal. Berdasarkan hasil wawancara, pekerja asal Kendal diasosiasikan dengan karakter disiplin, adaptif, patuh terhadap aturan, dan memiliki kemampuan dalam pekerjaan perawatan lansia. Identitas tersebut berkembang melalui pengalaman dan interaksi sosial PMI di lingkungan kerja Taiwan serta direproduksi melalui jaringan pekerja migran dan lembaga penempatan. Kondisi ini menjadi modal sosial yang turut mendukung keberlanjutan penempatan PMI asal Kendal ke Taiwan.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa PMI tidak hanya berperan sebagai aktor ekonomi, tetapi juga sebagai aktor sosial dalam membentuk persepsi masyarakat Taiwan terhadap Indonesia. Interaksi sehari-hari antara PMI dan masyarakat Taiwan

membentuk proses pembelajaran sosial yang memperkuat kepercayaan terhadap pekerja Indonesia. Pada saat yang sama, pengalaman bekerja di Taiwan turut mengubah cara PMI memandang perannya, dari sekadar pekerja migran menjadi aktor informal yang merepresentasikan Indonesia dalam interaksi transnasional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa NSP 2.0 berperan sebagai norma konstitutif yang membentuk dinamika penempatan PMI sekaligus memengaruhi pola hubungan sosial antara masyarakat Indonesia dan Taiwan. Peningkatan penempatan PMI, perubahan karakter sektor pekerjaan, konstruksi identitas pekerja asal Kendal, serta interaksi sosial di Taiwan menunjukkan bahwa migrasi tenaga kerja telah berkembang menjadi bagian dari proses konstruksi sosial dalam hubungan bilateral Indonesia–Taiwan. Temuan ini memperkuat perspektif konstruktivisme yang menempatkan struktur kebijakan dan agensi pekerja migran sebagai dua unsur yang saling membentuk dalam dinamika hubungan internasional.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *New Southbound Policy 2.0* (NSP 2.0) telah memengaruhi dinamika penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Kendal ke Taiwan. Dalam perspektif konstruktivisme, kebijakan tidak hanya mengatur perilaku aktor, tetapi juga dapat membentuk identitas, kepentingan, dan pola interaksi sosial (Wendt, 1992). Dalam konteks ini, NSP 2.0 dapat dipahami sebagai norma konstitutif yang mendorong perubahan hubungan Taiwan dengan negara-negara mitra di Asia Tenggara melalui penguatan *people-to-people connectivity* (Kabinawa, 2023).

Pada tingkat regulasi, implementasi NSP 2.0 mendorong perubahan tata kelola penempatan pekerja migran melalui perluasan peluang sektoral, penyederhanaan proses penempatan, dan penguatan kerja sama ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut sejalan dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja Taiwan akibat perubahan struktur demografi dan pertumbuhan jumlah penduduk lanjut usia (Yu-chen

& Chieh-yu, 2026). Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu sumber tenaga kerja penting, khususnya dalam sektor perawatan lansia atau *caregiver* (Arman, 2026).

Perubahan tersebut berkaitan dengan peningkatan penempatan PMI asal Kabupaten Kendal ke Taiwan. Data penelitian menunjukkan bahwa jumlah penempatan meningkat dari 3.118 orang pada 2023 menjadi 3.742 orang pada 2024 atau tumbuh sebesar 20%. Penempatan masih didominasi sektor *caregiver*, sedangkan sektor manufaktur, konstruksi, dan pertanian mulai menunjukkan perkembangan. Perluasan sektor pekerjaan tersebut menunjukkan adanya perubahan pola migrasi yang tidak lagi hanya berpusat pada pekerjaan domestik, tetapi secara bertahap bergerak menuju sektor yang lebih beragam (Yang & Chiang, 2019).

Meskipun demikian, perubahan regulasi tidak secara otomatis mengubah praktik migrasi pada tingkat lokal. BP3MI, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal, dan perusahaan penempatan pekerja migran berperan dalam menerjemahkan kebijakan melalui sosialisasi, rekrutmen, pelatihan, dan fasilitasi penempatan. Kondisi ini sejalan dengan perspektif konstruktivisme yang menjelaskan bahwa proses internalisasi norma membutuhkan aktor dan lembaga yang membawa serta menerjemahkan norma ke dalam praktik sosial (Finnemore & Sikkink, 1998).

Pada tingkat individual, interaksi sehari-hari PMI dengan masyarakat Taiwan menghasilkan proses *social learning*. Dalam perspektif konstruktivisme, *social learning* terjadi ketika interaksi berulang membentuk perubahan pemahaman, kepentingan, dan identitas aktor (Wendt, 1992; Pramono & Purwono, 2010). Proses tersebut paling kuat terlihat pada PMI yang bekerja sebagai *caregiver* karena pekerjaan perawatan lansia menciptakan hubungan sosial yang intensif antara pekerja, lansia, dan keluarga pengguna jasa.

Melalui interaksi tersebut, PMI tidak hanya mempelajari bahasa dan kebiasaan masyarakat Taiwan, tetapi juga mengenal nilai kedisiplinan, etos kerja, serta pola hubungan sosial masyarakat setempat. Proses interaksi berulang dapat

menghasilkan perubahan kognitif ketika aktor mengembangkan pemahaman baru terhadap lingkungan sosialnya (Adler, 1997). Sebaliknya, keluarga Taiwan juga membentuk pemahaman mengenai Indonesia melalui pengalaman langsung mereka berinteraksi dengan PMI.

Proses *social learning* secara bertahap mengubah cara PMI memaknai Taiwan. Pada tahap awal, Taiwan umumnya dipandang sebagai tujuan ekonomi yang menawarkan pendapatan dan peluang kerja. Namun, setelah mengalami proses adaptasi dan interaksi sosial, Taiwan mulai dipahami sebagai ruang hubungan sosial yang bersifat lebih relasional. Proses ini menunjukkan adanya internalisasi nilai dan norma melalui pengalaman sosial yang berlangsung secara berulang (Finnemore & Sikkink, 1998).

Setelah kembali ke daerah asal, PMI membawa pengalaman, nilai, dan praktik sosial yang diperoleh selama bekerja di Taiwan. Proses tersebut dapat dipahami melalui konsep *social remittances*, yaitu transfer gagasan, nilai, identitas, dan praktik sosial dari negara tujuan ke komunitas asal (Levitt & Lamba-Nieves, 2011). Dalam kasus PMI Kendal, proses transmisi berlangsung melalui keluarga, jaringan sesama PMI, komunikasi digital, dan media sosial. Media digital juga memperluas penyebaran informasi dan pengalaman migrasi kepada calon PMI di daerah asal (Rochaniyah & Indrayati, 2019).

Interaksi transnasional tersebut turut membentuk identitas kolektif PMI asal Kendal. Hasil penelitian menunjukkan munculnya konstruksi sosial terhadap pekerja Kendal sebagai pekerja yang disiplin, adaptif, dan dapat dipercaya. Identitas ini dibentuk dan direproduksi melalui pengalaman kerja, jaringan migrasi, lembaga penempatan, serta interaksi dengan pengguna jasa di Taiwan. Dalam perspektif Wendt (1992), kondisi tersebut menunjukkan terbentuknya *intersubjective meaning*, yaitu makna bersama yang muncul melalui interaksi sosial dan menjadi dasar bagi pembentukan identitas aktor.

Identitas kolektif dan jaringan kepercayaan tersebut membentuk modal sosial bagi PMI Kendal. Modal sosial memungkinkan jaringan migrasi menghasilkan manfaat kolektif melalui pertukaran

informasi, kepercayaan, dan dukungan antaranggota komunitas (Anggaunitakiranantika, 2017). PMI yang telah menyelesaikan kontrak kerja juga berperan sebagai sumber informasi dan mentor informal bagi calon pekerja migran. Dengan demikian, pengalaman individual berkembang menjadi pengetahuan kolektif yang mendukung keberlanjutan jaringan migrasi.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa PMI menjalankan fungsi sebagai *bridge actor* dalam hubungan Indonesia–Taiwan. Konsep *bridge actor* menggambarkan aktor yang menghubungkan dua kelompok atau entitas ketika hubungan formal memiliki keterbatasan tertentu (Ramadhan & Amaliyah, 2023). Dalam konteks hubungan Indonesia–Taiwan yang dibatasi oleh kebijakan *One China Policy*, PMI menciptakan ruang interaksi langsung antara masyarakat Indonesia dan Taiwan melalui aktivitas sosial sehari-hari (Tukan, 2023).

Fungsi penjemabatan tersebut berlangsung melalui interaksi linguistik dan budaya, jaringan informasi transnasional, serta pembentukan reputasi pekerja Indonesia. PMI memperkenalkan nilai, kebiasaan, dan kehidupan sosial Indonesia kepada keluarga pengguna jasa di Taiwan. Pada saat yang sama, mereka membawa pengalaman dan pemahaman mengenai Taiwan kepada masyarakat di Kabupaten Kendal. Proses pertukaran tersebut menunjukkan berlangsungnya difusi norma melalui interaksi interpersonal (Finnemore & Sikkink, 1998).

Namun, agensi PMI sebagai *bridge actor* masih menghadapi berbagai keterbatasan. Hambatan bahasa, relasi kerja yang tidak setara, kerentanan kontraktual, dan isolasi sosial dapat membatasi ruang interaksi PMI dengan masyarakat Taiwan. Kondisi pekerja migran juga tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan ekonomi yang membentuk posisi mereka dalam hubungan kerja transnasional (Devi et al., 2026). Oleh karena itu, proses *social learning* dan konstruksi identitas tidak berlangsung secara seragam, tetapi dipengaruhi sektor pekerjaan, durasi penempatan, kondisi kerja, dan intensitas interaksi sosial.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan adanya hubungan dialektis antara

struktur NSP 2.0 dan agensi PMI asal Kabupaten Kendal. NSP 2.0 membentuk regulasi, peluang kerja, dan konteks yang memungkinkan peningkatan mobilitas PMI ke Taiwan. Pada saat yang sama, praktik kerja dan interaksi sosial PMI turut mereproduksi norma *people-to-people connectivity*, membentuk identitas kolektif pekerja Indonesia, serta memperkuat persepsi Taiwan sebagai mitra strategis.

Temuan tersebut menguatkan argumen Wendt (1992) bahwa struktur dan agensi saling mengkonstitusi. Struktur NSP 2.0 membentuk ruang bagi mobilitas dan interaksi transnasional, sedangkan PMI melalui *social learning*, *social remittances*, dan fungsi sebagai *bridge actor* turut memperkuat norma dan makna sosial yang mendukung hubungan Indonesia–Taiwan. Namun, kontribusi PMI masih lebih kuat pada tingkat interpersonal dan komunitas dibandingkan tingkat institusional. Oleh karena itu, penguatan perlindungan pekerja dan mekanisme kelembagaan diperlukan agar pengalaman PMI dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap perkembangan hubungan Indonesia–Taiwan.

4. Simpulan Dan Saran

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi *New Southbound Policy* 2.0 memengaruhi dinamika penempatan pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Kendal ke Taiwan pada periode 2023–2025, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Jumlah penempatan meningkat dari 3.118 orang pada 2023 menjadi sekitar 4.100 orang pada 2025, dengan dominasi sektor *caregiver* dan pertumbuhan bertahap pada sektor manufaktur. Kebijakan tersebut dijalankan melalui perluasan kuota sektoral, penyederhanaan visa kerja, dan pembukaan sektor pekerjaan baru yang dimediasi oleh BP3MI, Disnaker Kabupaten Kendal, dan P3MI. Peningkatan penempatan didorong oleh perluasan peluang kerja, jaringan sosial antarmigran, serta reputasi positif pekerja asal Kendal, tetapi masih terhambat oleh tingginya biaya penempatan, keterbatasan bahasa, lemahnya akses pengaduan, dan belum optimalnya koordinasi antarlembaga. Dalam perspektif konstruktivisme, pekerja migran tidak

hanya berfungsi sebagai tenaga kerja, tetapi juga sebagai aktor non-negara yang menjembatani hubungan linguistik, budaya, ekonomi, dan reputasi Indonesia–Taiwan. Namun, kapasitas agensi tersebut masih bersifat asimetris dan lebih kuat dalam membentuk citra Taiwan di lingkungan asal dibandingkan membangun citra Indonesia secara luas di Taiwan. Temuan ini menegaskan bahwa NSP 2.0 dan praktik migrasi memiliki hubungan yang saling membentuk serta menunjukkan pentingnya diplomasi masyarakat, peran aktor lokal, dan analisis kebijakan internasional pada berbagai tingkat.

5. Daftar Pustaka

- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Win Afgani, M. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01>
- Caroline, C., Sugiyanto, F. X., Kurnia, A. S., Lestari, E. P., & Srimindarti, C. (2019). Dampak Spillover Pekerja Migran Indonesia (PMI) Asal Jawa Tengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jawa Tengah. *Indicators : Journal of Economic and Business*, 1(2), 191–207. <https://doi.org/10.47729/indicators.v1i2.44>
- Devi, R. S., Prakoso, S. G., Sayoga, I. P., & Syakira, H. D. (2026). Implications of Indonesian Migrant Worker Fluctuations on Taiwan Trade Rate Under the New Southbound Policy Framework (2019-2023). *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 14(2), 175–189. <https://doi.org/10.25077/ajis.14.2.175-189.2025>
- Effendi, T. D. (2023). Taiwan's Soft Power in Indonesia: Assessing the Education Aspects. In *Taiwan and Southeast Asia*. Routledge.
- Jamil, N. S. (2024). *Taiwan's New Southbound Policy in Southeast Asia and the 'China Factor': Deepening Regional Integration Amid New Reality*. In *Southward Bound*. Routledge.
- Kabinawa, L. N. R. W. (2023). Unpacking Taiwan's 'People-Centred' New Southbound Policy in

- Indonesia: A Transnational Perspective. *International Journal Of China Studies*, 75–102.
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>
- Putri Zakiyyah, O. (2025). *Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Taiwan Tahun 2019-2023* [Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik]. <https://digilib.unila.ac.id/87566/>
- Ramadhan, M. Z., & Amaliyah, R. (2023). Strategi Indonesia Dalam Manajemen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Taiwan Pasca New Southbound Policy. *Siyar Journal*, 3(1), 74–90. <https://doi.org/10.15642/siyar.2023.3.1.74-90>
- Septiana, N. N., Khoiriyah, Z., & Shaleh. (2024). Metode penelitian studi kasus dalam pendekatan kualitatif. *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10(04), 233–243. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v10i04.5181>
- Wendt, A. (1992). Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics. *International Organization*, 46(2), 391–425.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).